

Pemilu dan Konflik dalam Keluarga: Menjaga Harmoni dalam Perbedaan Pendapat

Moch. Azis Qoharuddin

*Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia
virusnash@gmail.com*

Abstract

Conflicts within families often arise when members have different political opinions, especially during election periods. Such conflicts can threaten family harmony and disrupt relationships between family members. This study aims to explore the impact of political dissent and elections on conflict in the family as well as strategies that can be used to maintain harmony in the face of such dissent. Qualitative research was conducted using a library review approach. Data were collected through a review of libraries related to the themes of conflicts caused by elections. Data analysis was conducted through a process of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results showed that political disagreements and elections triggered family conflicts. These conflicts include communication tensions, emotional separation, and disagreements in decision making. Factors that influence the level of conflict include the intensity of disagreement, the inability to engage in dialogue constructively, and the influence of mass media. However, this study also found strategies that can help maintain harmony in the face of political disagreements in the family. These strategies include opening a respectful dialog, willingness to listen to, trying to understand the views of the other party, and focusing on shared values and goals. In addition, the use of reliable and critical sources of information can reduce conflicts that arise.

Keywords: *Election, Intra-family Conflict, Difference of Opinion*

Abstrak

Konflik dalam keluarga seringkali muncul ketika anggota keluarga memiliki perbedaan pendapat politik, terutama selama periode pemilihan umum (pemilu). Konflik semacam itu dapat mengancam harmoni keluarga dan mengganggu hubungan antar anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak perbedaan pendapat politik dan pemilu terhadap konflik dalam keluarga serta strategi yang dapat digunakan untuk menjaga harmoni dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustakan. Data dikumpulkan melalui telaah pustakayang terkait dengan tema konflik yang terjadi disebabkan oleh pemilu. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat politik dan pemilu dapat memicu konflik dalam keluarga. Konflik tersebut meliputi ketegangan komunikasi, pemisahan emosional, serta ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konflik antara lain intensitas

perbedaan pendapat, ketidakmampuan untuk berdialog secara konstruktif, dan pengaruh media massa. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa strategi yang dapat membantu menjaga harmoni dalam menghadapi perbedaan pendapat politik dalam keluarga. Strategi tersebut meliputi pembukaan dialog yang saling menghormati, kesediaan untuk mendengarkan dan mencoba memahami pandangan pihak lain, serta fokus pada persamaan nilai-nilai dan tujuan bersama. Selain itu, penggunaan sumber informasi yang dapat dipercaya dan kritis juga dapat mengurangi konflik yang timbul.

Kata Kunci: *Pemilu, Konflik Dalam Keluarga, Perbedaan Pendapat*

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.¹ Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu proses politik yang penting dalam sistem demokrasi. Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih perwakilan mereka di dalam pemerintahan.² Namun, pemilu juga seringkali menjadi momen yang memunculkan perbedaan pendapat politik di antara anggota masyarakat, termasuk di dalam lingkungan keluarga.

Pelaksanaan Pemilu adalah salah satu ciri negara demokrasi, karna Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan oleh seluruh rakyat, proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan.³ Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilihan umum (pemilu) sering kali menjadi momen yang menegangkan dan memicu konflik di dalam keluarga. Ketika anggota keluarga memiliki pandangan politik yang berbeda, perdebatan yang sengit bisa terjadi, bahkan memicu tensi yang tinggi dan merusak harmoni keluarga. Namun, penting untuk

¹ Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an Civic Education : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32632>.

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Fajar Media Press, 2011).

³ Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (Sinar Grafika, 2021).

diingat bahwa konflik dalam keluarga bisa diatasi dengan pemahaman, toleransi, dan komunikasi yang baik. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi cara-cara untuk menjaga kedamaian dan menjalin hubungan yang sehat saat menghadapi perbedaan pendapat politik dalam keluarga.⁴

Keluarga adalah lingkungan sosial yang paling dekat bagi individu. Di dalam keluarga, anggota keluarga memiliki hubungan emosional dan saling bergantung satu sama lain.⁵ Keluarga juga menjadi tempat di mana nilai-nilai, keyakinan, dan pola pikir dibentuk. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perbedaan pendapat politik dan pilihan pemilu dapat menjadi sumber konflik di dalam keluarga. Konflik dalam keluarga terkait pemilu dan perbedaan pendapat politik dapat memiliki dampak yang merugikan.⁶ Konflik semacam itu dapat merusak hubungan antar anggota keluarga, menciptakan ketegangan komunikasi, memicu pemisahan emosional, dan mengganggu harmoni keluarga secara keseluruhan. Konflik yang intens dapat menghancurkan kepercayaan dan kualitas hubungan di antara anggota keluarga, dan pada gilirannya, dapat membawa dampak negatif bagi kesejahteraan psikologis dan emosional keluarga.⁷

Namun, meskipun perbedaan pendapat politik dalam keluarga dapat memicu konflik, penting untuk menjaga harmoni dan mengatasi konflik tersebut dengan cara yang konstruktif. Penting bagi anggota keluarga untuk dapat memahami dan menghormati perbedaan pendapat, serta mencari cara untuk berkomunikasi secara efektif dan mempertahankan hubungan yang kuat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Benjamin R. Warner, dkk. berjudul “Political difference and polarization in the family: The role of (non) accommodating communication for navigating identity differences”,⁸

⁴ Muhtar Haboddin, *Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2015).

⁵ Nandorari Saptenly Buling and Aloysius L. S. Soesilo, “Komunikasi Dalam Keluarga Tradisional Yang Mengalami Konflik Karena Pilkada Di Kabupaten Alor,” *Jurnal Psikohumanika* 13, no. 1 (June 9, 2021): 1–21, <https://doi.org/10.31001/j.psi.v13i1.1144>.

⁶ Yosin Kogoya and Achmad Nurmandi, “Konflik Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Puncak, Papua Tahun 2011-2012),” *Journal of Governance and Public Policy* 2, no. 1 (2015).

⁷ Wahid Ode, “Dampak Pemilu 2019 Terhadap Konflik Sosial Di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat” (skripsi, IAIN Ambon, 2021), <http://repository.iainambon.ac.id/1896/>.

⁸ Benjamin R. Warner, Colleen Warner Colaner, and Jihye Park, “Political Difference and Polarization in the Family: The Role of (Non)Accommodating Communication for Navigating Identity Differences,”

dan penelitian yang dilakukan oleh Stephen L. Wasby berjudul "The Impact of the Family on Politics: An Essay and Review of the Literature".⁹ Oleh karena itu, penelitian mengenai pemilu dan konflik dalam keluarga serta strategi untuk menjaga harmoni dalam menghadapi perbedaan pendapat politik sangatlah relevan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sumber konflik dan strategi penyelesaiannya, keluarga dapat menjaga hubungan yang harmonis dan membangun lingkungan yang mendukung bagi perkembangan individu di tengah perbedaan pendapat politik yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Mengurai Makna Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, yang pada gilirannya bertugas bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.¹⁰

Tujuan utama Pemilu biasanya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Dari wakil rakyat inilah rakyat Indonesia secara keseluruhan membebaskan beban-beban kenegaraan dipundaknya. Wakil rakyat inilah yang punya andil besar bersama dengan pemerintah dalam menentukan kemana arah akan berjalannya negeri ini. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun undang-undang pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran memilih untuk pemilihan umum, yaitu: Sudah genap berumur 17 tahun.

Journal of Social and Personal Relationships 38, no. 2 (February 1, 2021): 564–85, <https://doi.org/10.1177/0265407520967438>.

⁹ Stephen L. Wasby, "The Impact of the Family on Politics: An Essay and Review of the Literature," *The Family Life Coordinator* 15, no. 1 (1966): 3–24, <https://doi.org/10.2307/581548>.

¹⁰ Bintan R Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), hlm, 167.

Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakil dalam pemilihan anggota badan perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Langsung, Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Kedua, Umum, Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. Ketiga, Bebas, Seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Keempat, Rahasia, Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.¹¹

Mengenal Konflik Sosial

Konflik bukan merupakan suatu hal yang asing dalam kehidupan manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa konflik sudah ada sebelum manusia ada. Salah satu contoh adalah dalam sejarah kenabian Islam. Sejarah mencatat bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia, sepanjang seseorang masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik dimuka bumi ini, baik itu konflik antarindividu maupun antarkelompok. Jika konflik antara perorangan tidak bisa diatasi secara adil dan proposional, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik antarkelompok. Dengan kata lain, munculnya sebuah konflik tidak lain karena bersinggungannya pihak satu dengan yang lain.¹²

Konflik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konflik dengan sederhana dimaknai sebagai suatu yang bersifat alamiah

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1

¹² Maurice Duverger. *Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rajawali Press, 2005). 35

dan naluriah. Artinya, konflik merupakan fenomena kemanusiaan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Konflik merupakan kodrat bagi manusia. Konflik bersifat given dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak heran bila kemudian kita menyaksikan ada kalanya konflik sengaja dipilih manusia secara sadar untuk menyelesaikan masalahnya.

Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konflik merupakan separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa pemilikan dan kontrol sarana-sarana berada dalam satu individu-individu yang sama.¹³ Menurut Dahrendorf tidak selalu pemilik sarana-sarana juga bertugas sebagai pengontrol apalagi pada abad kesembilan belas. Bentuk penolakan tersebut ia tunjukkan dengan memaparkan perubahan yang terjadi di masyarakat industri semenjak abad kesembilan belas. Perubahan sosial tidak hanya datang dari dalam tetapi juga dari luar masyarakat.

Konflik sosial lebih banyak dipahami sebagai keadaan tidak berfungsinya komponen-komponen masyarakat sebagaimana mestinya atau gejala penyakit dalam masyarakat yang terintegrasi secara tidak sempurna. Dengan kata lain, konflik sosial diyakini sebagai suatu fakta utama dalam masyarakat, baik itu masyarakat agraris maupun masyarakat modern. Surbakti mengatakan bahwa konflik terjadi karena dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga, organisasi, dan kelas-kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Diantara kelompok-kelompok tersebut memiliki perbedaan taraf kekuasaan dan wewenang.¹⁴

Salert mendefinisikan konflik sebagai benturan struktur dalam masyarakat yang dinamis antara struktur yang dominan dan struktur yang minimal. Motifnya adalah penguasaan sumber daya dalam masyarakat, baik sumber daya politik maupun ekonomi.¹⁵ Dalam perspektif secara umum, konflik diartikan sebagai pertikaian, pertentangan atau perselisihan yang diidentikkan dengan kekerasan. Anggapan tentang konflik yang identik dengan kekerasan tersebut berawal dari pemikiran yang menganggap bahwa konflik hanya mencakup konflik fisik, seperti kerusuhan politik, pemberontakan, revolusi, dan perang antarbangsa.

Dalam hal ini, konflik berarti dilibatkannya benda-benda fisik dalam menyelesaikan perbedaan tersebut. Anggapan tersebut tidaklah salah dan juga tidak mutlak

¹³ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 1992) 108

¹⁴ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*....109

¹⁵ Iswandi Syahputra. *Jurnalisme Damai*. (Yogyakarta: Pilar Media.2006) : 11

kebenarannya. Sebab ada konflik selain fisik yaitu konflik lisan. Konflik lisan terjadi bila pertentangan atau perbedaan tersebut belum sampai pada penggunaan benda-benda fisik. Konflik lisan dapat berupa debat, polemik, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya yang hanya terbatas pada saling menyerang dengan kata-kata. Dalam konteks ini, konflik dapat dipahami sebagai pertarungan memperebutkan wacana sosial, bukan memperebutkan kepentingan praktis.

Konflik yang murni beraspek politik misalnya konflik diantara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain dalam usaha mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dikuasai pemerintah. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap pemerintah yang berkembang akan menjadi gerakan separatis atau pemberontakan. Duverger menyatakan bahwa pada komunitas-komunitas besar cenderung menjadi birokratis. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya pergolakan politik yang dilaksanakan oleh mesin-mesin politik dan organisasi- organisasi politik yang memiliki kapasitas besar dan memanfaatkan masyarakat dengan memberikan mereka posisi yang sebenarnya abstrak.¹⁶

Surbakti menyatakan bahwa masyarakat dan sistem politik terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing memiliki kepentingan yang bertentangan sehingga masyarakat dan sistem politik selalu berada dalam keadaan ketidakseimbangan dan konflik.

Mengenal Keluarga

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Setiap individu berangkat dari sistem sosial keluarga, sebelum ia memasuki sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat, kemudian kembali pada sistem sosial keluarga. Oleh karena itu, sistem nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam membentuk kepribadian individu.

Keluarga juga merupakan subsistem (unit) kelembagaan terkecil dalam sistem sosial yang lebih besar, seperti masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan apa bila ada ungkapan, “sumber kekuatan dan kesejahteraan suatu bangsa

¹⁶ Duverger. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, Judul Asli: *Party Politics and Pressure Groups A comparative Introduction*, Penerjemah : Laila Hasyim, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2005): 55

adalah kekuatan dan kesejahteraan keluarga.” Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik pola interaksi antara individu dalam keluarga maupun pola interaksi antarkeluarga dalam sistem sosial yang lebih besar (masyarakat).¹⁷

Definisi lainnya keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama. Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Akan tetapi asal-usul dapat pula terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan yang seterusnya yang berbeda. Keluarga bisa saja berarti berisikan ayah, ibu, anak-anak atau seisi rumah, selain itu keluarga juga bisa di artikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ikatan darah, perkawinan dan lain sebagainya, dimana mereka tinggal dan hidup bersama.

Banyak yang mengatakan bahwa keluarga merupakan nama lain dari rumah tangga, di mana awal dari keluarga adalah rumah tangga, tapi sebenarnya antara keluarga dan rumah tangga memiliki arti yang berbeda. Adapun arti dari keluarga seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa keluarga merupakan suatu kesatuan yang terikat oleh hubungan seperti memiliki ikatan darah, terikat oleh perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama, sedangkan rumah tangga yaitu kelompok sosial yang berpusat pada suatu keluarga batih yang artinya keluarga yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum menikah atau yang memisahkan diri.¹⁸ Sementara itu Burgess dan Locke juga mengemukakan empat karakteristik keluarga yang terdapat pada semua keluarga dan juga untuk membedakan keluarga dari kelompokkelompok sosial lainnya:

Pertama, Keluarga yaitu susunan keluarga yang di satuakan oleh ikatan perkawinan, darah dan adopsi. Ikatan antara suami dan istri berawal dari pernikahan, serta hubungan ikatan antara anak dan orang tuanya berasal dari hubungan dara dan bisa juga adopsi. Kedua, Hubungan anggota keluarga di tandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan hidup rukun. Ketiga, Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang

¹⁷ Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*,.. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 41

¹⁸ Sugarda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001), 45

berinteraksi dan berkomunikasi dan menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, sesama saudara, dan orang tua kepada anak, tetapi masing-masing keluarga di perkuat oleh kekuatan sentimen-sentimen yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman. Keempat, Keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan bersama, yang pada hakikatnya di peroleh dari kebudayaan umum, akan tetapi setiap keluarga memiliki kepribadian yang berbeda antara keluarga yang satu dan keluarga lainnya, perbedaan itu berasal dari bagai mana cara membentuk pola hidup dalam suatu keluarga, baik itu dalam cara berkomunikasi dengan anggota- anggota keluarga yang lain, serta cara membentuk pola-pola tingkahlaku setiap anggota keluarga.

Dengan demikian dari hasil beberapa penjelasan diatas kalau menyangkut keluarga, maka dapat di simpulkan bahwa di dalam keluarga terdapat fungsional antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya. akan tetapi yang perlu diperhatikan bagaimana membentuk struktur keluarga yang baik, karena jika struktur tidak di bangun dengan baik, maka akan berdampak terhadap 17 anggota keluarga lainnya, terutama pengembangan pola-pola kehidupan dalam rumah tangga.¹⁹

Selain itu sebagai lingkungan primer, hubungann antara manusia yang paling insentif dan paling awal terjadi adalah di dalam keluarga. Sebelum seorang anak mengenal lingkungan yang lebih luas, ia terlebih dahulu mengenal lingkungan keluarganya, maka sebelum mengenal norma-norma serta nilai-nilai dari masyarakat umum, pertama kali ia menyerah pada nilai dan norma yang ada di dalam keluarganya.²⁰ Oleh karena itu bagi seorang suami harus mengetahui tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan begitupun dengan seorang istri, harus pandai dalam hal-hal menyangkut rumah tangga dan menyenangkan suaminya.

Selain itu fungsi dari keluarga, dapat menunjang berbagai terbentuknya kepribadian anak. Seorang anak akan tumbuh dan berkembang sesuai yang di ajarkan di dalam kehidupan keluarga, maka dari tugas dari orang tua harus mempunyai bekal yang kemudian selengkap-lengkapnyanya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingka laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat dan bisa di terapkan

¹⁹ (Israwati, 2009:34)

²⁰ Sarwono, Jonatan dan Hary Lubis. *Metode Riset untuk Desain Komunikasi Visual*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), 113

dengan sebaik mungkin. Keluarga yang memiliki kualitas yang baik apa bila sesuai dengan UU No 10 Tahun 1992 tentang pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil serta fisikis mental-spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Keluarga batih memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seorang anak, oleh karena itu seorang anak harus di bina dengan sebaik mungkin sebelum anak tersebut dikenalkan pada dunia luar. Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Soejono Soekanto, bahwa sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga batih memiliki peranan- peranan tertentu, antara lain: Pertama, Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggotanya, dimana ketentraman dan ketertiban di peroleh dalam wadah tersebut. Kedua, Keluarga merupakan unit sosial ekonomi yang secara material memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketiga, Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup. Keempat, Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa keluarga batih memiliki pengaruh besar dalam mengenalkan anak pada nilai-nilai serta kaidah yang di anit oleh masyarakat dimana ia di lahirkan. Setelah semua peran-peran serta fungsi keluarga telah di jalankan dengan baik, maka kehidupan keluarga akan berjalan dengan baik serta hidup harmonis.²¹

Pemilu dan Konflik dalam Keluarga

Pemilu dan Konflik dalam Keluarga: Menjaga Harmoni dalam Perbedaan Pendapat Pemilihan umum (pemilu) sering kali menjadi momen yang menegangkan dan memicu konflik di dalam keluarga. Ketika anggota keluarga memiliki pandangan politik yang berbeda, perdebatan yang sengit bisa terjadi, bahkan memicu tensi yang tinggi dan merusak harmoni keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa konflik dalam keluarga bisa diatasi dengan pemahaman, toleransi, dan komunikasi yang baik. Dalam artikel ini,

²¹ Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo. Persada, 1990) 213

kita akan menjelajahi cara-cara untuk menjaga kedamaian dan menjalin hubungan yang sehat saat menghadapi perbedaan pendapat politik dalam keluarga.

Pertama, Menghormati perbedaan pendapat: Pemilu adalah wujud dari demokrasi, dan setiap individu memiliki hak untuk memiliki pandangan politik yang berbeda. Penting bagi setiap anggota keluarga untuk menghormati perbedaan pendapat tersebut, walaupun mereka tidak setuju. Menghargai perspektif orang lain akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di dalam keluarga.

Kedua, Hindari argumen yang emosional: Diskusi politik yang sengit dan emosional sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Untuk mencegah hal ini, usahakan untuk menghindari argumen yang emosional dan tetap fokus pada isu-isu politik yang sedang dibahas. Jika percakapan menjadi terlalu panas, ada baiknya untuk mengambil waktu sejenak, tenangkan diri, dan kembali lagi ke topik pembicaraan dengan kepala dingin.

Ketiga, Berkomunikasi dengan baik: Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat dalam keluarga. Cobalah untuk mendengarkan dengan seksama pandangan orang lain tanpa mencela atau memotong pembicaraan. Bicarakan pendapat dengan sopan dan jangan biarkan perbedaan politik menghalangi dialog yang konstruktif. Berusaha untuk memahami alasan di balik pandangan politik anggota keluarga lainnya dan berbagi pandangan dengan argumen yang jelas dan rasional.

Keempat, Fokus pada persamaan: Meskipun pemilu dapat memperjelas perbedaan di antara keluarga, tetapkan fokus pada persamaan yang Anda miliki. Ingatlah bahwa keluarga adalah tempat di mana kasih sayang dan persatuan harus diutamakan. Temukan kesamaan dalam nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh setiap anggota keluarga, dan gunakan ini sebagai titik sentuh yang memperkuat hubungan.

Kelima, Batasi diskusi politik: Jika perdebatan politik terus-menerus terjadi dan memicu konflik, ada baiknya untuk membatasi diskusi politik dalam keluarga. Tentukan waktu-waktu khusus untuk membahas politik, seperti saat berkumpul secara formal untuk diskusi terencana. Selain itu, fokuskan perhatian pada kegiatan positif lainnya di luar konteks politik yang dapat memperkuat ikatan keluarga.

Keenam, Jaga emosi dan ketenangan diri: Konflik dalam keluarga bisa memicu emosi yang kuat. Penting untuk menjaga ketenangan diri dan tidak membiarkan emosi

menguasai. Jika Anda merasa emosi mulai mendominasi, ambil napas dalam-dalam, berikan jeda sejenak, atau cari kegiatan yang dapat membantu Anda tenang dan menjaga keseimbangan emosi.

Perbedaan pendapat politik dalam keluarga adalah hal yang wajar, terutama selama periode pemilu. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan keluarga adalah lebih penting daripada perbedaan politik. Dengan menghormati perbedaan pendapat, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga ketenangan diri, keluarga dapat melewati masa pemilu tanpa mengorbankan hubungan yang berharga.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa menjaga harmoni dalam perbedaan pendapat Pemilihan umum (pemilu) sering kali menjadi momen yang menegangkan dan memicu konflik di dalam keluarga. Ketika anggota keluarga memiliki pandangan politik yang berbeda, perdebatan yang sengit bisa terjadi, bahkan memicu tensi yang tinggi dan merusak harmoni keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa konflik dalam keluarga bisa diatasi dengan pemahaman, toleransi, dan komunikasi yang baik. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi cara-cara untuk menjaga kedamaian dan menjalin hubungan yang sehat saat menghadapi perbedaan pendapat politik dalam keluarga. Perbedaan pendapat politik dalam keluarga adalah hal yang wajar, terutama selama periode pemilu. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan keluarga adalah lebih penting daripada perbedaan politik. Dengan menghormati perbedaan pendapat, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga ketenangan diri, keluarga dapat melewati masa pemilu tanpa mengorbankan hubungan yang berharga.

Daftar Pustaka

- Bintan R Saragih , *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), hlm, 167.
- Buling, Nandorari Saptenty, and Aloysius L. S. Soesilo. "Komunikasi Dalam Keluarga Tradisional Yang Mengalami Konflik Karena Pilkada Di Kabupaten Alor." *Jurnal Psikohumanika* 13, no. 1 (June 9, 2021): 1–21. <https://doi.org/10.31001/j.psi.v13i1.1144>.
- Duverger. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok penekan*, Judul Asli: *Party Politics and Pressure Groups A comparative Introduction*, Penerjemah : Laila Hasyim, Yogyakarta: Bina Aksara. (2005: 55)
- Haboddin, Muhtar. *Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2015.

- Iswandi Syahputra. *Jurnalisme Damai*. (Yogyakarta: Pilar Media.2006) : 11
- Kogoya, Yosin, and Achmad Nurmandi. "Konflik Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Puncak, Papua Tahun 2011-2012)." *Journal of Governance and Public Policy* 2, no. 1 (2015).
- Maurice Duverger. *Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rajawali Press, 2005).
- Ode, Wahid. "Dampak Pemilu 2019 Terhadap Konflik Sosial Di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat." Skripsi, IAIN Ambon, 2021. <http://repository.iainambon.ac.id/1896/>.
- Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: Grasindo, 1992) 109
- Rozak, Abdul. *Pendidikan Kewarga[negara]an Civic Education : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32632>.
- Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika, 2021.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press, 2011.
- Sarwono, Jonatan dan Hary Lubis. 2007. Metode Riset untuk Desain Komunikasi. Visual. Yogyakarta: Penerbit Andi. (Sarwono, 2007:113).
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Sugarda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: ... Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001).
- Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*,. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 41
- Syahrum, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1
- Warner, Benjamin R., Colleen Warner Colaner, and Jihye Park. "Political Difference and Polarization in the Family: The Role of (Non)Accommodating Communication for Navigating Identity Differences." *Journal of Social and Personal Relationships* 38, no. 2 (February 1, 2021): 564–85. <https://doi.org/10.1177/0265407520967438>.
- Wasby, Stephen L. "The Impact of the Family on Politics: An Essay and Review of the Literature." *The Family Life Coordinator* 15, no. 1 (1966): 3–24. <https://doi.org/10.2307/581548>.